

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan (Defitri, 2016). Laporan Keuangan menggambarkan posisi keuangan dari hasil suatu proses akuntansi selama periode tertentu yang digunakan sebagai alat komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan (Suteja, 2018). Laporan Keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No. 1 bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan pelaporan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelas yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Kualitas Laporan Keuangan menggambarkan hasil dari akhir proses kegiatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi harta, utang, dan modal yang terjadi dalam rumah tangga perusahaan laba dan ruginya. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut bisa dipahami, serta dapat memenuhi kebutuhan pemakainya untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang

menyesatkan, sehingga laporan keuangan tersebut bisa dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014).

Pemerintah dituntut harus selalu melaporkan kegiatannya selama satu tahun berjalan, yang berupa laporan keuangan. Dimana laporan keuangan yang dilaporkan harus berkualitas baik dari segi informasi ataupun penulisannya. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (Amiroh & Haryanto, 2021). Perlu disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintahan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan (Yuliana 2010).

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan salah satunya yaitu harus memenuhi karakteristik kualitatif. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laporan tersebut (1) andal, (2) relevan, (3) dapat dipahami, dan (4) dapat dibandingkan. Bentuk laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK, pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ifa Ratifah, 2012). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksaan yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP) (Liza Rahayu dkk 2014).

Tujuan laporan keuangan yaitu untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan (Betri & Asep, 2016). Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (IAI, 2009:2). Selain tujuan laporan keuangan juga mempunyai manfaat, manfaat laporan keuangan pemerintahan daerah yaitu untuk memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuidasi dan solvabilitas, untuk memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi, juga untuk memonitor kinerja sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta memberikan informasi untuk perencanaan dan penganggaran, dan memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional (Mahmudi 2010).

Untuk itu dapat diambil kesimpulan bahwa Kualitas Laporan Keuangan merupakan suatu proses akuntansi yang berstruktur mengenai laporan posisi keuangan dalam suatu periode akuntansi dimana kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, yang harus sesuai standar akuntansi yang berlaku dan berguna bagi pengguna laporan keuangan (*Stakeholder*).

Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh pemanfaatan akuntan menyusun laporan itu sendiri atau penerapan sistem informasi akuntansi keuangan secara optimal dan atau peran internal yang masih lemah (Yuliana 2010).

IAI menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah masih rendah/kurang handal. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia Kompartemen Akuntan Pendidik (IAI KAPD) menyatakan “terutama korupsi di sejumlah pemerintah daerah” (sumber REPUBLIKA.co.id 2018). BPK juga menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah masih rendah dan kurang relevan, terlihat dari masih sedikitnya daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). BPK telah merilis hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan pusat. Ketua BPK Agung Firman Sampurna menyatakan meski memberi opini wajar tanpa pengecualian, lembaganya menemukan masalah yang berujung pada kerugian Negara (KOMPAS.com 2020).

Dari fenomena diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pentingnya membuat laporan keuangan yang berkualitas untuk mendeskripsikan performa keuangan pemerintah dan untuk menghindari adanya kerugian, kecurangan, dll serta untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Seiring berjalanya waktu dengan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia maka meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) organisasi sektor publik yang ada di Indonesia pada umumnya memiliki kualitas informasi akuntansi yang kurang baik. Informasi yang kurang baik tersebut tidak dapat diandalkan sebagai

bahan pertimbangan untuk membuat keputusan setelah periode pelaporan. Kurang baiknya kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dibuktikan dengan sedikitnya pemerintahan daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilakukan oleh BPK. (Bastian 2010).

Pemerintah menetapkan *Integrity Financial Manajement Information System* dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar menjadi lebih baik dan menjadi bentuk perwujudan revormasi manajemen keuangan pemerintahan. (Mentri Keuangan Bambang Brodjonegoro 2015). Oleh karena itu dibuatlah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik disebutkan bahwa “penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukungan dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat.” (Presiden Joko Widodo 2018). Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang juga adalah salah satu pemanfaatan dari teknologi. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai sebuah sistem yang mendokumentasi, mengadministrasikan serta mengolah data pembangunan daerah, keuangan daerah dan pemerintahan lainnya, dan menjadi informasi yang dapat diakses publik. (Mentri Dalam Negri 2019).

Sistem informasi akuntansi dapat diartikan sebagai bentuk sistem informasi yang memiliki tujuan untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada sebelumnya,

memperbaiki pengendalian akuntansi dan juga pengecekan internal, serta membantu memperbaiki biaya klerikal dalam pemeliharaan catatan akuntansi (Mulyadi,2008).

Berdasarkan Permendagri Menurut Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lain, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan bagian dari Sistem Informasi Akuntansi yang dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan definisi diatas. Didalam SIPD terdapat 4 portal data yaitu, e-database, e-planing, e-money, dan e-reporting (Rangga & Serly, 2020). Dengan diwajibkannya menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014, yaitu wajib dilaksanakan, ada sanksinya, dan berpengaruh terhadap penilaian kinerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. maka pemerintah haruskan membuat laporan keuangan dengan menggunakan sistem tersebut.

Menurut Lilis Puspitawati & Sri Dewi Anggadini (2011:247) untuk membangun suatu sistem informasi akuntansi yang baik atau berkualitas perusahaan harus mencermati kendala-kendala untuk perancangan SIA dengan cara mengidentifikasi konflik antara sasaran dengan kendala kendala tersebut, karena untuk mendapatkan suatu sistem yang berkualitas tergantung dari pengembangan atau perancangan yang dilakukan perusahaan tersebut dengan cara mengatasi dan menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi, seringkali perusahaan menghadapi kendala kendala yang menghambat perancangan suatu sistem antara lain kendala

dari pihak manajemen itu sendiri yang muncul jika sistem yang dirancang akan mempengaruhi keamanan atau kedudukannya dalam perusahaan sehingga mereka menentang penerapan sistem tersebut.

Lilis Puspitawati dan Sri Dewi Aggadini (2011:22) mengemukakan bahwa kegiatan sistem informasi akuntansi terdiri atas beberapa unsur penting yaitu: Pelaku, Prosedur, Peralatan, dan Data.

Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di seluruh daerah di Indonesia baik itu pemerintah provinsi (pemprov) maupun pemerintah kabupaten/kota, ternyata menemukan masalah. Masalah terjadi karena aplikasi SIPD tidak siap pakai dan masih membutuhkan penyempurnaan atau pemeliharaan kembali (*Sumber* : Indoposco.id 2021). Pemprov dan pemkab/pemkot di seluruh Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi SIPD. Tetapi sistem yang disiapkan masih belum sempurna banyak menu yang tidak tersedia bahkan belum bisa berjalan karena sistemnya belum dibangun secara sempurna, sehingga menghambat beberapa kegiatan pemerintah seperti untuk membuat laporan keuangan yang masih belum bisa karena menu laporan keuangan dalam sistem belum dapat diakses (*Sumber* : Curupekspress.com 2021).

Perwakilan Rakyat Daerah H. Ade Wawan, Spd, I menyoroti pelaksanaan SIPD di pemkab Bandung Barat yang belum siap. H. Ade Wawan menyampaikan, bahwa SIPD belum sempurna bikin karut marut keuangan daerah di Bandung Barat (GlobalMedia News, 2021).

Ditjen Bina Keuangan Daerah (kedua) Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) karena menggunakan sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) “Banyak sekali manfaat yang diperoleh dari penggunaan SIPD, di antaranya tidak ada lagi duplikasi penganggaran, penyeragaman proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah, mengoptimalkan kegiatan utama, serta mempermudah pengawasan dan audit,” Kata Beliau. Di lain sisi, melalui SIPD anggaran daerah dapat dihemat. Sebab, daerah tidak perlu lagi menganggarkan aplikasi atau sistem kedalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam sistem tersebut juga, waktu yang diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih singkat (Sindonews.com, 2022).

Dari fenomena diatas telah disebutkan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah masih rendah hal ini dikarenakan oleh system yang belum siap pakai dan keterbatasan sumber daya manusia pada setiap daerah sehingga menghambat dalam kegiatan organisasi.

Hasil Penelitian Frista Chairina & Tineke Wehartaty (2019), Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan system informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, Artinya pemanfaatan system informasi akuntansi membantu BPKPD dalam penyediaan informasi keuangan yang berkualitas.

Kualitas Laporan Keuangan dipengaruhi oleh factor system pengendalian internal berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal. System pengendalian internal sangat penting dalam menunjang perbaikan pemerintah daerah dan merupakan factor pendukung untuk pencapaian pemerintah

yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang buruk dan penyajian yang belum dapat diharapkan secara wajar, salah satunya bisa disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal (Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono 2008). Terdapat lima komponen berisikan tentang factor system pengendalian internal yang dibangun dari Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan Pemantauan (Mointoring).

Mulyadi (2017) Sistem pengendali internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran – ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendalan dalam akuntansi, mendorong eesiensi dipatuhinya kebijakan manajemen.

Terdapat beberapa fungsi dari system pengendalian internal itu sendiri seperti pedoman untuk menguji efektivitas system pengendalian dipemerintahan. Selain itu agar mencapai sasaran dan juga menyiapkan informasi keuangan yang andal, menjamin hukum atau peraturan yang berlaku agar dipatuhi diperlukan kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Jika pemerintahan mempunyai system pengendalian yang kurang dan lemah, maka laporan keuangan yang disajikan tidak diyakini kewajarannya oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) (Nurillah dan Muid, 2014).

BPK temukan kelemahan Pengendalian internal dalam Laporan keuangan. BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan, meski demikian lembaga audit tersebut menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Hendra menuturkan, kelemahan pengendalian Internal

itu antara lain, pengelolaan dan penatausahaan uang titipan di rekening pemerintah lainnya (RPL) belum tertib, sehingga terdapat potensi penyalahgunaan uang titipan. Berikutnya, pengelolaan dan upaya penyelesaian Piutang Uang Pengganti belum optimal diantaranya 11 putusan masih belum ditemukan berkasnya serta pengelolaan persediaan barang rampasan belum memadai dan belum jelas status perkembangan penyelesaiannya. Selain itu Hendra menyatakan BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara (ANTARANEWS.com 2021).

Dari fenomena yang telah disebutkan diatas menyatakan bahwa system pengendalian internal masih lemah, hal ini terjadi karena banyak Organisasi Perangkat Daerah (ODP) tidak patuh dalam persoalan pencatatan asset juga permasalahan lainnya yang tidak patuh pada peraturan.

Hasil penelitian Putri Andriani, Abin Suarsa & Yuniati (2019), bahwa Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan di PDAM Tirtawengi Kota Bandung.

Dari uraian di atas menunjukan adanya *research gap* pada penelitian sebelumnya. Pemilihan objek penelitian lah langkah selanjutnya atau tahap berikutnya dan memiliki makna strategis dalam sebuah penelitian, objek penelitian merupakan media yang tepat untuk menformulasikan kondisi nyata dengan sebuah permodelan teoritis dan kerangka fikir yang cenderung bersifat relative abstrak.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka judul penelitian yang akan diambil oleh peneliti yaitu **“PENGARUH EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (SIPD) DAN**

PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA INSTANSI DINAS KOTA BANDUNG BAGIAN KEUANGAN DAN ASET”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa identifikasi masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. IAI menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah masih rendah/kurang handal. Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. BPK juga menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan daerah masih rendah dan kurang relevan. meski memberi opini wajar tanpa pengecualian, lembaganya menemukan masalah yang berujung pada kerugian Negara.

Belum berkualitasnya Kualitas Laporan Keuangan Pada Dinas Kota Bandung dapat dipicu dengan sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang kurang efektif

2. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di seluruh daerah di Indonesia ternyata menemukan masalah terjadi karena aplikasi SIPD tidak siap pakai dan masih membutuhkan penyempurnaan atau pemeliharaan kembali juga sistem yang disiapkan masih belum sempurna banyak menu yang tidak tersedia bahkan belum bisa berjalan karena sistemnya belum dibangun secara sempurna.
3. BPK temukan kelemahan Pengendalian internal dalam Laporan keuangan. kelemahan pengendalian Internal itu antara lain, pengelolaan

dan penatausahaan uang titipan di rekening pemerintah lainya (RPL) belum tertib, sehingga terdapat potensi penyalahgunaan uang titipan. Juga ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan Negara

1.3 Rumusan Masalah

Penelitian yang dilakukan penulis akan memberikan beberapa Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Dinas Kota Bandung?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Instansi Dinas Kota Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Dinas Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengendalian internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Instansi Dinas Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1) Bagi Peneliti

Bagi penulis sebagai tambahan pengetahuan dan dapat mengetahui serta mempelajari masalah-masalah yang terkait dengan factor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan

2) Dirjen Bangda Kemendagri

Sebagai bahan masukan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) yang baik dalam menerapkan Sistem dalam sektor publik.

1.5.2 Kegunaan Akademik

1) Bagi Pengembangan Ilmu

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan akuntansi sector publik.

2) Bagi Penulis selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya tentang penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam sektor publik.